

SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KABUPATEN WAJO (Studi di Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua)

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik
Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin



OLEH:
RIF'ATUL HAERAH RUSTAM
E041191080

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KABUPATEN WAJO (Studi di Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua)

Yang Diajukan Oleh :

RIF'ATUL HAERAH RUSTAM

E041191080

Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Skripsi

Menyetujui :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si
NIP. 197508182008011008

acc. bgl 28 wop 2023.

Dr. Arana, S.IP., M.Si
NIP. 197107051998032002

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik



Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.
NIP. 19621231 199003 1 023

HALAMAN PENERIMAAN

SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KABUPATEN WAJO (Studi di Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua)

Disusun dan diajukan oleh:

Rifatul Haerah Rustam

E041191080

Dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi

Program Studi Ilmu Politik, Departemen Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si (.....)

Sekretaris : Dr. Ariana, S.IP., M.Si (.....)

Anggota : Drs. H. Andi Yakub, M. Si., Ph. D (.....)

Anggota : Haryanto, S.IP., M.A (.....)

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rif'atul Haerah Rustam

NIM : E041191080

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Ilmu Politik

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **"Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Wajo (Studi di Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua)"** adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 25 Oktober 2023



Rif'atul Haerah Rustam

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, sang ilahi atas berkah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Wajo (Studi Di Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua)”**. Tak lupa juga, penulis haturkan shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada baginda sang kekasih Allah SWT, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini merupakan salah satu syarat wajib bagi mahasiswa strata satu (S-1) pada Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP).

Skripsi ini saya persembahkan pertama-tama kepada dua orang spesial yang sangat berjasa dan berperan besar di dalam hidup saya yaitu kedua orang tua saya, Bapak Drs. Rustam dan Ibu Jumsary. yang telah menjadi orang tua terhebat, yang bekerja keras mencari nafkah, yang selalu sabar mendidik dan memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doa yang tentu takkan bisa penulis balas.

Dan tak lupa juga, terima kasih tak terhingga kepada Dosen Pembimbing Bapak Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si dan Ibu Dr. Ariana, S.IP., M.Si yang telah dengan sabar membimbing penulis menulis skripsi ini dari awal penulisan proposal hingga ujian akhir.

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu perkenankan dengan penuh rasa hormat penulis ingin mempersembahkan skripsi ini dan menghaturkan beribu terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ir Jamaluddin Jompa, MSc., yang telah memberi penulis kesempatan belajar di Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran rektorat. Terima kasih tak terlupakan juga pada Rektor Universitas Hasanuddin 2018-2022, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa Universitas Hasanuddin.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Prof. Dr. Phil sukri, S.IP., M.Si., sekaligus Dosen Ilmu Politik yang telah memberi penulis kesempatan menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Akademik dan kemahasiswaan, Ibu Dr. Hasniati, S.Sos., M.Si., beserta segenap jajaran staf akademik, Pak Sutamin, Ibu Irma dan Pak Herman.
4. Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Alumni, Bapak Dr. M. Iqbal Sultan, M.Si., beserta segenap jajaran staf.
5. Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi, Bapak prof. Dr. Suparman Abdullah, M.Si. beserta segenap jajaran staf.

6. Ketua Departemen Ilmu Politik, Bapak Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D., yang telah membantu kelancaran administrasi akademik.
7. Dosen-dosen Departemen Ilmu Politik: Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si., Alm. Bapak Prof. Dr. Basir Syam, M.Ag., Bapak Dr. Muhammad Saad, M.A., Ibu Dr. Ariana, S.IP., M.si., Ibu Dr.Sakinah Nadir, S.IP., M.Si., Ibu Dr. Gustiana A Kambo, M.Si., Bapak Andi Naharuddin, S.IP., M.Si., Ibu Endang Sari, S.IP., M.Si., Bapak Dr. Muh. Imran, S.IP., M.Si., Ibu Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP., Bapak Prof. Dr. Muhammad M.Si., Bapak Haryanto, S.IP., M.A., Bapak Zulhajar, S.IP., M.A., dan Ibu Dian Ekawaty, S.IP., M.A., yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
8. Staf Administrasi Departemen Ilmu Politik, Bapak Syamsuddin, S.T., dan Ibu Musriati S.E., yang telah membantu kelancaran penulis dalam berbagai urusan administrasi perkuliahan.
9. Seluruh teman-teman Departemen Ilmu Politik angkatan 2019, yang telah kebersamai dari awal perkuliahan hingga akhir terutama teman-teman terdekat penulis, dan terkhusus kepada saudari Rista ilma andasari.
10. Seluruh teman KKN Unhas Gel 108 IPTEKS Pangkep, Kec. Ma'rang, Desa Pitusunggu. Terima kasih atas cerita dan pengalaman berharga yang diberikan selama melaksanakan KKN, Dede, Kholis, Ibnu, Nonon, sahabat kaumi atur saudari Feby dan Michelle serta teman dekat penulis adik Richard.

11. Saudara dan saudari penulis Muh. Fuad Rizaldy dan Nurul Auliah terima kasih atas dukungan dan bantuan yang telah di berikan selama ini kepada penulis.
12. Kepada Az, terima kasih karena selalu siap mendengar cerita-cerita penulis selama ini. Terima kasih karena telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, meluangkan waktu, pikiran, materi maupun moril. Terima kasih karena senantiasa sabar menghadapi penulis serta menjadi bagian dari perjalanan penulis hingga saat ini.
13. Kepada sobat *Creep*, Pikoy dan Radha, terima kasih selalu menemani dan menjadi support system penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi ini. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah dan selalu kebersamai meluangkan waktu tenaga pikiran serta sabar menghadapi tingkah laku penulis.
14. *Chicks the gang*, terima kasih tingkah recehnya, cerita-cerita lawaknya, juga terima kasih sudah menemani malam-malam mellow penulis.
15. Adik-adik Selalu Salah, Hikma, Dindin, Putri, Ippa, terima kasih sudah menjadi mood booster penulis yang selalu ada kebersamai serta memberikan keceriaan, terima kasih atas bantuan bantuannya yang tidak terhingga.
16. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, terima kasih telah memberikan bantuan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.

17. *Lastly*, terima kasih untuk diri saya sendiri. Terima kasih sudah percaya, terima kasih sudah bekerja keras, terima kasih karena tidak menyerah.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dikarenakan berbagai keterbatasan penulis sebagai manusia biasa. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa terbuka bagi semua pihak demi perbaikan dan peningkatan kualitas skripsi ini.

Makassar, 25 Oktober
2023

Rif'atul Haerah Rustam

ABSTRAK

Rif'atul Haerah Rustam. E041191080. Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Wajo (Studi Di Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua) Dibawah Bimbingan Prof. Dr. Phil sukri, S.IP., M.Si dan Dr. Ariana, S.IP., M.Si.

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di kabupaten wajo (studi di desa lompoloang kecamatan pitumpanua). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan di Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo serta bagaimana bentuk implementasi kebijakan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data secara primer yaitu melalui observasi, wawancara serta dokumentasi dan secara sekunder yaitu kajian pustaka berupa buku, jurnal dan situs internet terkait topik penelitian.

Hasil penelitian Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Lompoloang menggambarkan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo masih belum maksimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi hal ini adalah anggaran yang tidak memadai, komunikasi yang kurang baik antara pemerintah dan masyarakat, serta pengawasan anggota legislatif yang kurang.

Kata kunci: Pembangunan, Desa, Kebijakan, Pemerintah, Infrastruktur

ABSTRACT

Rif'atul Haerah Rustam. E041191080. Implementation of Road Infrastructure Development Policy in Wajo Regency (Study in Lompoloang Village, Pitumpanua District) Under the Guidance of Prof. Dr. Phil Sukri, S.IP., M.Si and Dr. Ariana, S.IP., M.Si.

This research examines the implementation of road infrastructure development policies in Wajo district (study in Lompoloang village, Pitumpanua subdistrict). This research aims to determine the factors that influence the implementation of development in Lompoloang Village, Pitumpanua District, Wajo Regency and the form of implementation of policies for implementing road infrastructure development in Lompoloang Village, Pitumpanua District, Wajo Regency.

This research uses a qualitative descriptive method with primary data collection, namely through observation, interviews and documentation and secondarily, namely literature review in the form of books, journals and internet sites related to the research topic.

The results of research on the Implementation of Road Infrastructure Development Policy in Lompoloang Village illustrate that the implementation of road infrastructure development in Lompoloang Village, Pitumpanua District, Wajo Regency is still not optimal. Factors that influence this are inadequate budgets, poor communication between the government and the community, and insufficient supervision by legislative members.

Keywords: Development, Village, Policy, Government, Infrastructure

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Konsep Implementasi Kebijakan	9
2.2 Model Implementasi Kebijakan (Merilee S. Grindle).....	11
2.3 Konsep Pembangunan	14
2.4 Konsep Infrastruktur (Jalan)	15
2.5 Kerangka Pikir	19
2.6 Skema Kerangka Pikir	22
2.7 Penelitian Terdahulu.....	23
BAB III	28

METODE PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian	28
3.2 Lokasi Penelitian	28
3.3 Sumber Data Penelitian.....	29
3.4 Teknik Pengumpulan Data	29
3.5 Teknik Analisis Data	30
3.6 Informan Penelitian.....	31
BAB IV.....	33
GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN	33
4.1 Letak Geografis Kabupaten Wajo	33
4.2 Kondisi Geografis Desa Lompoloang	34
4.3 Struktur Perangkat Desa Lompoloang.....	35
4.4 Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Desa Lompoloang	36
BAB V.....	39
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
5.1 Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo	39
5.2 Analisis Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle dalam pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo.....	46
BAB VI.....	54
PENUTUP.....	54
6.1 Kesimpulan.....	54
6.2 Saran-saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA.....	56
LAMPIRAN DOKUMEN PENELITIAN	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Pengurus Desa Lompoloang.....	36
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Dokumentasi 1. Jalan Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua.....	58
Dokumentasi 2. Wawancara bersama Bapak Dahlan S.Sos staf Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo.....	59
Dokumentasi 3. Wawancara bersama bapak Hasmin S.E selaku sekretaris Desa Lompoloang.....	60
Dokumentasi 4. Wawancara bersama salah satu warga Desa Lompoloang, bapak Ahmad Budi S.E selaku kepala dusun 1 Desa Lompoloang.....	61
Dokumentasi 5. Wawancara dirumah bapak Muhammad Mashuri selaku staf Dinas pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan Kabupaten Wajo.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peranan pemerintah daerah sebagai koordinator ditinjau dari tugas dan fungsi pemerintah daerah adalah bertanggungjawab atas semua kegiatan pemerintahan di tingkat kabupaten seperti pelaksanaan, implementasi dan monitoring kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan, dan tugas-tugas diantaranya berkaitan dengan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan penyediaan prasarana lingkungan berupa fasilitas umum infrastruktur yang meliputi jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit dan lain-lain.

Pelaksanaan pembangunan di negara berkembang seperti di Indonesia menekankan pada upaya peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan pendapatan nasional. Dalam paradigma pertumbuhan, peran pemerintah adalah menyusun perencanaan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Paradigma pembangunan yang hanya mengacu pada paradigma pertumbuhan dan pemerataan telah terbukti rentan terhadap masalah-masalah sosial.¹ Perencanaan pembangunan yang disusun oleh suatu daerah merupakan perwujudan dari asas desentralisasi berbagai instansi penyelenggaraan pemerintahan, politik pembangunan dan manajemen pembangunan dari pusat ke daerah.

¹ Indra Bastian, Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 14.

Pemberian otonomi kepada daerah Kota/Kabupaten didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Pemberian kewenangan atas dasar asas desentralisasi tersebut menyebabkan semua bidang pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan suatu otonomi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah Kota/Kabupaten sepenuhnya, baik yang menyangkut penentuan kebijakan, perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.² Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah dan martabat masyarakat di daerah, memberikan peluang pendidikan politik dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi, peningkatan percepatan pembangunan, dan pada akhirnya diharapkan pula penciptaan cara berpemerintahan yang baik.³

Kabupaten Wajo adalah salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan Indonesia yang berpenduduk sebanyak kurang lebih 379.396 jiwa. Letak Kabupaten Wajo bersebelahan dengan Kabupaten

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, pasal 1, ayat 5.

³ Muhammad Mujtaba Habibi, Analisis Pelaksanaan Desentralisasi dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten di Indonesia, Malang: Universitas Negeri Malang, Th.28, Nomor 2, 2017.

Luwu timur, Kabupaten Sidrap pada bagian barat, Kabupaten Soppeng bagian utara, serta di sisi barat berbatasan dengan Kabupaten Bone. Secara geografis Kabupaten Wajo yang berada di tengah-tengah menjadikannya sebagai salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Ketersediaan begitu banyaknya potensi sumber daya alam ini tentu saja memerlukan pengelolaan serta pemanfaatan yang efektif dan efisien. Hal ini menjadikan pembangunan daerah menjadi salah satu kunci agar pengelolaannya dapat dengan mudah di laksanakan dan hasilnya dapat disalurkan. Oleh karena itu, pengembangan pembangunan infrastruktur jalan sangat menunjang sebagai akses utama pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Wajo.

Berbicara mengenai kondisi infrastruktur, pada kenyataannya kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Wajo perlu mendapat perhatian. Kondisi infrastruktur jalan yang kurang memadai menjadikan pergerakan masyarakat, arus barang dan jasa menjadi terhambat. Selain mendapat cecaran serta stigma buruk masyarakat luas, tingkat kesejahteraan masyarakat di beberapa daerah di Kabupaten Wajo juga masih cenderung rendah. Seperti yang kita ketahui, jalan merupakan prasarana transportasi yang memiliki peranan penting dalam usaha membuka, mempermudah dan meningkatkan aspek ekonomi, sosial dan budaya di suatu wilayah. Keberadaan infrastruktur jalan yang baik merupakan salah satu hal yang sangat diperlukan demi meningkatkan taraf dalam kehidupan bermasyarakat.

Kecamatan Pitumpanua adalah salah satu dari 14 kecamatan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Indonesia dengan mayoritas masyarakatnya mengandalkan jalan darat sebagai prasarana transportasi utama dalam segala aspek kehidupan.⁴ Hal ini menjadikan keberadaan infrastruktur jalan yang baik merupakan salah satu hal yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Selain di bidang perekonomian, akses jalan juga sangat penting dalam bidang pendidikan, kesehatan dan juga sosial. Dalam bidang pendidikan misalnya, kondisi jalan yang memprihatinkan seringkali membahayakan keselamatan mengingat mayoritas pelajar khususnya sekolah menengah di Kecamatan Pitumpanua menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi utama mereka. Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang sosial ekonomi, kesehatan dan peningkatan mutu pendidikan di Kecamatan Pitumpanua dapat sukses dan berhasil dengan adanya infrastruktur jalan yang baik. Dengan baiknya sarana infrastruktur jalan maka taraf hidup daerah tersebut akan menjadi lebih baik pula, ditambah lagi dengan mobilitas masyarakat dan barang yang lancar.

Dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat kecamatan di tahun 2021, Pemerintah daerah Kabupaten Wajo menyatakan keseriusannya dalam pengembangan pembangunan infrastruktur jalan khususnya di Kecamatan Pitumpanua. Pada dasarnya, pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Wajo merupakan program kerja utama Pemerintah Daerah awal periode 2019 dengan

⁴ Ibid. Hlm 65

pertimbangan pembangunan infrastruktur jalan dapat menjadi penunjang berbagai sektor. Kebijakan pembangunan infrastruktur jalannya tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah. Meskipun diketahui proses pembangunan di beberapa daerah sudah terealisasi serta telah dilakukan beberapa kali perbaikan dari tahun ke tahun, stigma buruk masyarakat tetap melekat mengenai proses pelaksanaannya yang tidak optimal dan merata. Hingga kini masih banyak ruas jalan di Kecamatan Pitumpanua yang terlihat dalam kondisi rusak dan berlubang dan bergelombang serta tersebar di banyak titik. Beberapa titik terparah kerusakan jalannya yaitu jalan-jalan penghubung di desa.

Desa Lompoloang Merupakan salah satu desa dengan posisi strategis di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo. Desa Lompoloang dengan letak wilayah yang cukup jauh dari ibukota kabupaten merupakan salah satu desa luas terpencil yang berbatasan dengan Kabupaten Sidrap. Sebagian besar wilayahnya yang berada di daerah perbukitan/dataran tinggi menjadikan daerahnya kaya akan sumber daya alam. Seperti dikatakan sebelumnya, pengelolaan serta pemanfaatan yang efektif dan efisien tentu akan membutuhkan akses yang menunjang proses pelaksanaannya. Pada kenyataannya, Desa Lompoloang merupakan salah satu desa dengan tingkat kerusakan infrastruktur jalan terparah di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo. Kerusakan jalannya pun akan semakin parah ketika curah hujan tinggi sehingga menyebabkan jalan berlumpur dan berkubang. Kondisi yang tidak

memadai ini sekali lagi menjadikan mobilitas barang dan jasa menjadi terhambat.

Berdasarkan paparan diatas sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang terkait kondisi infrastruktur jalan di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, masalah yang muncul menarik untuk dikaji lebih lanjut bagi penulis sehingga penulis memilih judul “Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Wajo (Studi di Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua)”.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu

1. Bagaimana analisis model implementasi kebijakan Merilee S. Grindle dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Wajo?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana analisis model implementasi kebijakan Merilee S. Grindle dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Wajo.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan di Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini menarik untuk dicermati karena memberikan beberapa manfaat kepada pembaca. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dengan bidang kajian terkait, khususnya dalam ranah disiplin Ilmu Politik dalam konteks kebijakan publik.
2. **Manfaat Praktis**
Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta memberikan informasi kepada publik mengenai implementasi kebijakan. Selain manfaat kepada publik, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya wawasan pengetahuan mahasiswa terkhusus

mahasiswa ilmu politik mengenai analisis implementasi kebijakan infrastruktur jalan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu, dalam hal ini undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Implementasi kebijakan juga dapat dikatakan sebagai aktivitas setelah dikeluarkannya pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini tidak lain untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan kecil hingga besar sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

Implementasi merupakan sebuah proses untuk mewujudkan rumusan kebijakan menjadi tindakan kebijakan guna mewujudkan hasil akhir yang diinginkan. Proses implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan

kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam tataran praktis, implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan dasar dimana kebijakan diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Kebijakan dalam hal ini bermakna bagaimana langkah-langkah pemerintah dalam menjawab pilihan tindakan yang ditempuh agar kebijakan yang diambil dapat berjalan secara terus-menerus dan diimplementasikan dengan baik.

Sementara itu istilah kebijakan secara etimologi berasal dari Bahasa Inggris *policy*. Akan tetapi, kebanyakan orang berpandangan bahwa istilah kebijakan senantiasa disamakan dengan istilah kebijaksanaan. Padahal apabila dicermati berdasarkan tata bahasa, istilah kebijaksanaan berasal dari kata wisdom. Istilah kebijakan berbeda dengan istilah kebijaksanaan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih lanjut, sedangkan kebijakan mencakup peraturan-peraturan yang ada didalamnya termasuk konteks politik. Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan. Hal tersebut berarti kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Apabila kebijakan berisi nilai-nilai yang

bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan tersebut akan mendapat kendala ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Kebijakan menurut karakternya adalah langsung mempraktekkan dalam bentuk program-program dalam proses pembuatan kebijakan. Analisis kebijakan meneliti sebab, akibat, kinerja dan program publik. Kebijakan tersebut sangat diperlukan dalam praktek pengambilan keputusan di sektor publik, dan karenanya dibutuhkan oleh para politisi, konsultan, dan pengambil keputusan oleh pemerintah. Program-program yang dilakukan oleh pemerintah senantiasa bisa berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan bisa memajukan daerahnya dalam menghadapi kemajuan masa yang akan datang. Kebijakan diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

2.2 Model Implementasi Kebijakan (Merilee S. Grindle)

Model implementasi kebijakan merupakan kerangka dalam melakukan analisis terhadap proses implementasi kebijakan sebagai alat untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang terjadi setelah ditetapkannya kebijakan tersebut, sehingga perilaku yang terjadi di dalamnya dapat dijelaskan. Oleh karena itu, penggunaan model implementasi kebijakan sangat diperlukan untuk melakukan studi

implementasi kebijakan. Keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak faktor pendukung dan penghambat yang terlibat didalamnya. Ada beberapa model yang digunakan untuk menjadi pedoman atau penuntun agar kebijakan tersebut tidak akan menyimpang dari apa yang sebelumnya telah dirumuskan dan pada umumnya model-model tersebut menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang diarahkan pada pencapaian kebijakan.

Salah satu diantara beberapa model implementasi kebijakan adalah yang dikemukakan oleh Marilee S. Grindle. Model implementasi kebijakannya dikenal dengan juga dengan "*Implementation as a Political and Administrative Process*". Grindle menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar, yang meliputi isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*).

Isi kebijakan meliputi sejauh mana kepentingan yang termuat dalam isi kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah program di dukung oleh sumberdaya yang memadai, serta manfaat yang diterima oleh masyarakat. Sementara konteks implementasi meliputi kekuasaan, karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa serta tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.⁵

⁵ Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princenton University Press, New Jersey. Hlm 7

Grindle memasukkan beberapa faktor penentu seperti kepentingan yang dipengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yang diharapkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, dan sumber daya yang dilibatkan ke dalam isi kebijakan (*content of policy*). Jika semua kepentingan benar-benar diperhitungkan dan diakomodasi maka suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan relatif berhasil. Suatu kebijakan juga relatif mudah diimplementasikan jika kebijakan tersebut memberikan manfaat kolektif dan dapat langsung dirasakan daripada kebijakan yang hanya memberikan manfaat kepada kelompok tertentu dan hasilnya baru bisa dinikmati dalam jangka panjang. Selain itu, semakin luas derajat perubahan yang diupayakan oleh suatu kebijakan maka semakin sulit kebijakan tersebut diimplementasikan.

Kemudian dalam konteks implementasi (*context of implementation*), Grindle memasukkan beberapa variabel seperti kekuasaan, karakteristik lembaga dan penguasa/rezim, serta kepatuhan dan daya tanggap. Aspek yang terakhir ini sangat penting. Tanpa responsivitas yang tinggi, implementor akan kehilangan banyak informasi yang sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kebijakan. Daya tanggap yang dimaksud harus diusahakan dalam kerangka menciptakan fleksibilitas, dukungan dan umpan balik, dengan tetap mempertahankan kontrol efektif atas alokasi sumberdaya sehingga keluaran dan dampak kebijakan yang diharapkan tetap dapat diwujudkan.

2.3 Konsep Pembangunan

umum makna tentang pembangunan adalah suatu proses perencanaan (*social plan*) yang dilakukan untuk membuat perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Konseptualisasi pembangunan merupakan proses perbaikan yang berkesinambungan pada suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih sejahtera sehingga terdapat beberapa cara untuk menentukan tingkat kesejahteraan pada suatu negara. Pembangunan juga diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan kemajuan hidup berbangsa. Akan tetapi pada sebagian besar masyarakat, pembangunan selalu diartikan sebagai perwujudan fisik. Pembangunan pada dasarnya tidak hanya persoalan fisik, meski makna pembangunan yang dipahami secara umum tersebut tidaklah salah. Seperti yang dikatakan diatas, secara umum makna pembangunan adalah setiap usaha mewujudkan hidup yang lebih baik sebagaimana yang didefinisikan oleh suatu negara *an increasing attainment of one's own cultural values*.⁶

pembangunan pada dasarnya bukanlah sekedar fenomena ekonomi semata. Pembangunan tidak sekedar ditunjukkan oleh prestasi pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara, tetapi lebih dari itu pembangunan memiliki prespektif yang luas. Dalam

⁶ Tjokrowinoto, Moeljarto, 1996. Pembangunan Dilema dan Tantangan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hlm 1

proses pembangunan, selain mempertimbangkan aspek pertumbuhan dan pemerataan, juga mempertimbangkan dampak aktifitas ekonomi terhadap kehidupan sosial masyarakat. Lebih dari itu, dalam proses pembangunan dilakukan upaya yang bertujuan untuk mengubah struktur perekonomian kearah yang lebih baik.⁷

Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan, pembangunan disini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan dimana setiap orang atau kelompok orang tentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang. Pembangunan pada dasarnya digunakan dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi.

2.4 Konsep Infrastruktur (Jalan)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) infrastruktur dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana umum. Sarana secara umum diketahui sebagai fasilitas publik seperti rumah sakit, jalan, jembatan, sanitasi, telepon, dsb. Sementara itu menurut *American*

⁷ Mudrajad Kuncoro, Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan, (Yogyakarta: STIM YKPN), Hlm 45

Public Works Association, infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan semua pelayanan dasar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat dikatakan bahwa infrastruktur merupakan sistem fisik yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Atau secara teknik, infrastruktur merupakan aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga memberikan pelayanan publik yang penting. Oleh karenanya, infrastruktur merupakan sarana dan prasarana yang tidak terpisahkan satu sama lain yang didefinisikan dalam suatu sistem.

Salah satu infrastruktur yang penting dalam sistem pelayanan publik yaitu jalan. Infrastruktur jalan merupakan salah satu pendukung utama dinamika dan aktivitas ekonomi baik itu di pusat maupun di daerah. Jalan yang merupakan prasarana transportasi mempunyai peranan penting dalam usaha membuka, mempermudah dan meningkatkan aspek ekonomi, sosial dan budaya dalam suatu negara. Infrastruktur jalan merupakan lokomotif untuk menggerakkan pembangunan ekonomi bukan hanya di perkotaan tetapi juga di wilayah pedesaan atau wilayah terpencil. Melalui proyek, sektor infrastruktur dapat menciptakan lapangan kerja yang menyerap banyak tenaga kerja. Selain itu, infrastruktur merupakan pilar menentukan kelancaran arus barang, jasa, manusia, uang dan

informasi dari satu zona pasar ke zona pasar lainnya. Jadi, perputaran barang, jasa, manusia, uang dan informasi turut menentukan pergerakan harga pasar dengan kata lain, bahwa infrastruktur jalan menetralsir harga-harga barang dan jasa antar daerah.

Keberadaan infrastruktur jalan yang baik merupakan salah satu hal yang sangat diperlukan oleh masyarakat demi meningkatkan taraf hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Tersedianya infrastruktur jalan yang memadai, akan mendukung pengembangan ekonomi masyarakat dalam kelancaran arus barang dan jasa. Hal ini memberikan dampak yang besar terhadap transportasi dan biaya pokok produksi barang serta memberikan peningkatan yang baik untuk kesejahteraan masyarakat. Lancarnya arus lalu lintas akan menunjang perkembangan perekonomian dan sosial suatu daerah. Sehingga pembangunan prasarana infrastuktur jalan akan mempermudah dan mempercepat arus mobalitas barang dan jasa. Aspek penting dari pembangunan adalah pembangunan dibidang fisik dan sosial, hal ini dapat diwujudkan melalui pembangunan dan perbaikan fasilitas infrastuktur yang ada seperti infrastruktur jalan.

Jalan diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Jalan umum, yaitu jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum. Jalan khusus, yaitu jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri. Jalan tol, yaitu jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaanya diwajibkan membayar tol. Jalan

umum dikelompokkan berdasarkan sistem, fungsi, status dan kelas jalan. Jalan umum dibagi dua menjadi sistem jaringan jalan primer dan sekunder. Sedangkan jalan umum yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya dibagi menjadi jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Untuk jalan umum menurut statusnya dikelompokkan menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa.

Jalan strategis Kabupaten adalah jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan kabupaten berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan Kabupaten, sedangkan jalan kota adalah jalan yang berada di daerah kota yang bersifat otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Pemerintah Daerah. Kuasa atas pengadaan infrastruktur jalan seperti yang diketahui ada pada Negara, lalu secara yuridis Negara membagi kewenangan tersebut menjadi beberapa kewenangan dalam penyelenggaraan jalan atau dikenal dengan otonomi daerah. Kewenangan tersebut meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan dalam hal penyelenggaraan jalan.

Penguasaan atas jalan ada pada negara dimana negara memberi wewenang kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan. Merujuk kepada Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 38 Tahun 2004, Pasal 13,14,15, dan 16 tentang kewenangan atas penyelenggaraan jalan

dikelompokkan menjadi beberapa. Yang pertama, penguasaan atas jalan ada pada negara. Penguasa oleh negara memberi wewenang kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan. Kedua, wewenang Pemerintah. Wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional. Wewenang penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. Ketiga, Wewenang Pemerintah Provinsi. Wewenang Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan provinsi. Wewenang penyelenggaraan provinsi meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi. Apabila pemerintah provinsi belum dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah. Lalu yang terakhir, Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota. Wewenang Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa. Wewenang Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota. Wewenang penyelenggaraan jalan Kabupaten, jalan Kota, dan jalan Desa meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. Kabupaten Wajo sendiri merupakan daerah otonomi yang kewenangan atas penyelenggaraan jalannya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah.

2.5 Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan konseptual bagaimana satu teori berhubungan di antara berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting terhadap masalah penelitian. Dalam kerangka pemikiran, peneliti harus menguraikan konsep atau variabel penelitiannya secara lebih terperinci. Sugiono menjelaskan kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara lebih kritis pertautan antara variabel yang di teliti.⁸

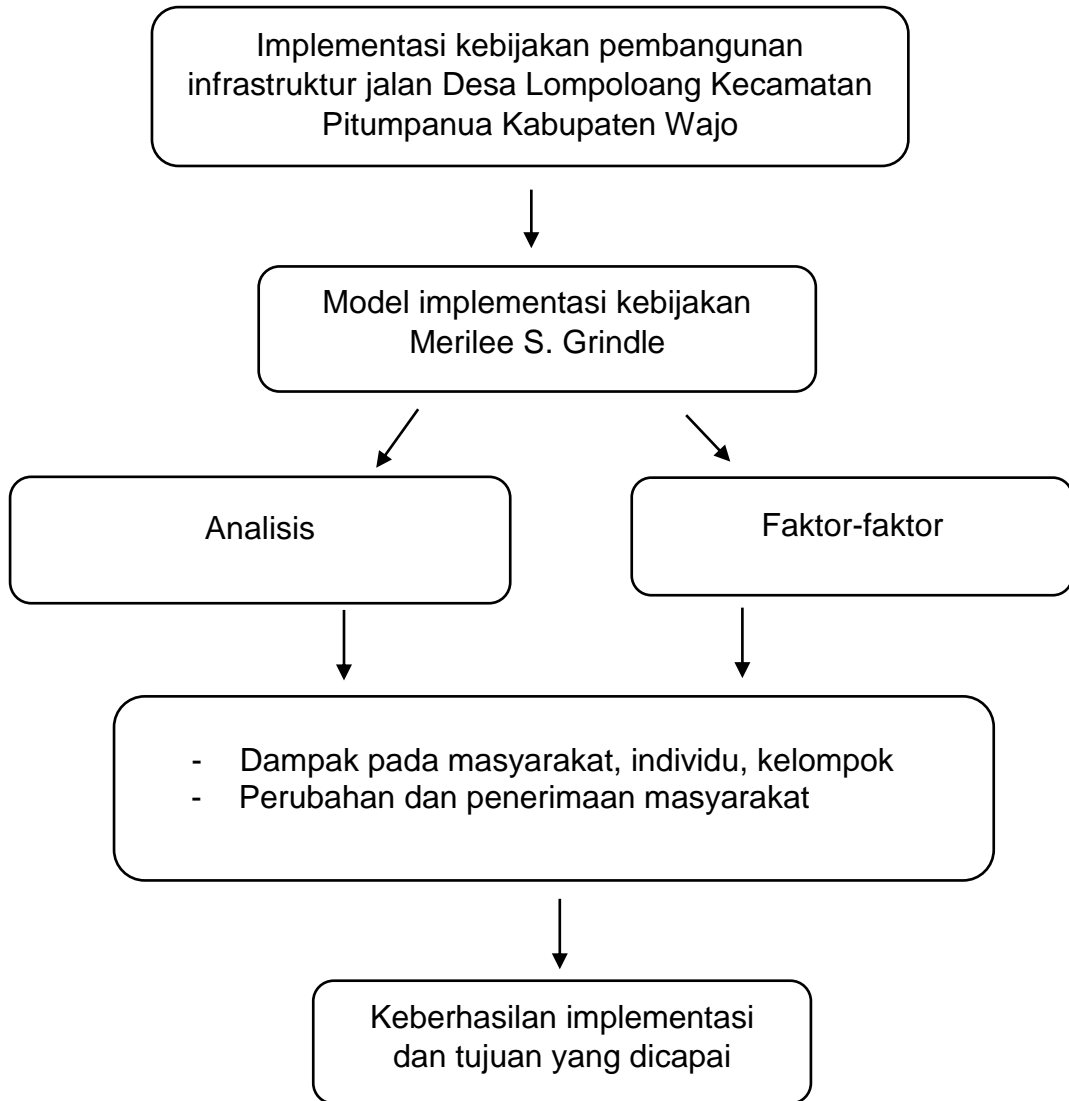
Peranan pemerintah daerah sebagai koordinator ditinjau dari tugas dan fungsi pemerintah daerah adalah bertanggungjawab atas pelaksanaan, koordinasi dan dukungan semua kegiatan pemerintahan di tingkat kabupaten seperti pelaksanaan, implementasi dan monitoring kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan. Pemerintah daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengsejahterahkan masyarakatnya. Salah satu dari tugas-tugas pemerintah daerah yaitu berkaitan dengan penyediaan prasarana lingkungan berupa fasilitas umum infrastruktur jalan. Pembangunan jalan merupakan salah satu pendukung utama dinamika dan aktivitas ekonomi di daerah.

Kabupaten Wajo yang terletak di bagian tengah Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan salah satu daerah dengan pembangunan infrastruktur jalan yang cukup memprihatinkan. Selain

⁸ Juliansa Noor, Metode penelitian: Skripsi, Tesis, Disertai dan Karya Ilmiah. (Jakarta: Kencana 2017). Hlm 76

jalan poros penghubung yang merupakan jalan nasional, jalan-jalan desanya pun tidak jauh dari kata memprihatinkan. Penyelenggaraan infrastruktur jalan di Kabupaten Wajo sendiri merupakan salah satu program kerja pemerintah daerah setempat yang kebijakannya tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 yang berlaku hingga saat ini. Pembangunan infrastruktur jalan ini terlaksana sejak tahun 2021 namun prosesnya dinilai tidak merata dan optimal hingga saat ini, dapat dilihat dari masih banyaknya kerusakan disepanjang badan jalan di Kabupaten Wajo. Hal ini menarik perhatian banyak pihak, namun belum benar-benar diketahui apa yang melatarbelakangi tidak optimalnya proses pelaksanaan pembangunan tersebut. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengidentifikasi mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Wajo serta bagaimana pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Wajo dengan menggunakan analisis model implementasi kebijakan Merilee S. Grindle.

2.6 Skema Kerangka Pikir



2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan usaha atau upaya peneliti untuk mencari sumber referensi yang akan menjadi perbandingan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian terdahulu bermanfaat bagi peneliti dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian yang dilakukan. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

1. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Retno Wulan Sekarsari dan Suyeno dari Universitas Islam Malang dengan judul penelitian *“Implementasi Kebijakan Pembangunan Jalan Antar Kecamatan di Kabupaten Kediri”* Tahun 2018. Penelitian ini membahas mengenai analisis praktek implementasi kebijakan pembangunan jalan antar kecamatan di Kabupaten Kediri juga deskripsi kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten dalam proses implementasinya. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Kediri berjalan dengan baik tetapi masih ada sedikit kekurangan pada pembangunan jalan penghubung antar desa yang hanya mendapat sedikit perhatian dari Pemerintah Kabupaten. Dinas PU Bina Marga sebagai implementor kebijakan pembangunan jalan kewenangan kabupaten kurang memperhatikan pembangunan jalan desa dari awal hingga akhir, dimana hal

tersebut terjadi karena terbentur masalah pendanaan untuk menangani dan membiayai pembangunan jalan desa tersebut.⁹

2. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Ibnu Thosin, Yusuf Hariyoko dan Anggraeny Puspaningtyas dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan judul penelitian *“Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Lamongan”* Tahun 2021. Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan (Jamula) Jalan Mantap dan Alus Lamongan dengan mengkaji empat indikator menggunakan Teori Edward III sebagai indikator keberhasilan implementasi kebijakan yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa Indikator faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan pembangunan jalan di Kabupaten Lamongan sudah berjalan optimal dengan adanya sosialisasi kebijakan menjadi kunci suatu komunikasi. Indikator faktor sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan (anggaran) dan sumber daya peralatan bisa dikatakan berjalan secara optimal dan akuntabilitas. Indikator faktor disposisi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di

⁹ Retno W. S, Suyeno. “Implementasi Kebijakan Pembangunan Jalan Antar Kecamatan Di Kabupaten Kediri.” *Jurnal Ketahanan Pangan. Volume 2, Nomor 1*. Universitas Islam Malang. 2018.

Kabupaten Lamongan sudah cukup berhasil dengan kemauan yang kuat oleh para pelaksana kebijakan untuk mendorong kebijakan tersebut merata di semua ruas. Sementara itu, indikator struktur birokrasi faktor struktur birokrasi berjalan dengan baik terkait implementasi kebijakan infrastruktur tersebut.¹⁰

3. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Sri Hartini dan Setiajeng Kadarsih dari Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto dengan judul penelitian *“Analisis Terhadap Implementasi Kebijakan Pengelolaan Jalan di Kabupaten Banyumas”* Tahun 2012. Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan pengelolaan jalan di Kabupaten Banyumas serta faktor-faktor yang cenderung mempengaruhi implementasinya. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas didasarkan oleh kebijakan tertulis dan termaktub dalam program kerja tahunan dalam menyediakan infrastruktur jalan. Program tersebut terbagi menjadi program pembangunan dan pemeliharaan jalan. Pembangunan jalan yang dilakukan berupa peningkatan dan pelebaran jalan dan pengaspalan jalan, sedangkan pemeliharaan jalan dilakukan melalui pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala.

¹⁰ Thosin. Ibnu, Hariyoko. Y, Puspaningtyas, A. *“Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Lamongan”*. Jurnal. Universitas 17 Agustus Surabaya. 2021.

Adapun faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan jalan berupa faktor hukum yang belum menyeluruh, faktor penegak hukum yang masih mengindik pada kebijakan pimpinan, faktor sarana atau fasilitas yang belum optimal, faktor masyarakat yang cenderung melepaskan tanggungjawab kepada pemerintah, dan faktor budaya permisif.¹¹

4. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Wahyu Kurniawan dan Karjuni Dt. Maani dari Universitas Negeri Padang dengan judul penelitian *“Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin dengan Menggunakan Model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn”* Tahun 2019. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana implementasi kebijakan pembangunan jalan yang telah di lakukan oleh pemerintah daerah dan pihak yang terkait dalam pembangunan jalan di Desa Muara Delang dengan menggunakan model Donald Van Metter dan Carl Van Horn yang didasarkan pada enam buah variabel. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa komunikasi antar organisasi terkait kegiatan-kegiatan pelaksanaan lancar. Disposisi atau sikap para pelaksana memiliki pengetahuan pemahaman dan pendalaman terhadap

¹¹ Hartini. Sri, Kadarsih. Setiajeng. *“Analisis Terhadap Implementasi Kebijakan Pengelolaan Jalan di Kabupaten Banyumas”*. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 No. 2. Universitas Jendral Soedirman Purwokerto. Tahun 2012

kebijakan yang sangat baik. Hal ini karena para pelaksana sepenuhnya telah menyadari standar dan tujuan dari kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin merupakan cita-cita dan harapan masyarakat sejak lama. Masyarakat berperan aktif dalam terlaksananya implementasi kebijakan ini. Masyarakat memahami pentingnya pembangunan jalan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan seperti peningkatan dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial-budaya masyarakat.¹²

Adapun perbedaan dari beberapa penelitian diatas dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian, dimana penelitian penulis akan membahas mengenai Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Wajo.

¹² Kurniawan. Wahyu, Maani. Dt. K. *"Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan Model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn"* Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik Vol. 1 No. 4. Universitas Negeri Padang. Tahun 2019

